



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA 2021

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,

Juma'in B.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja Palinfo Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab IV Penutup

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi di tahun 2021 ini. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada tahun 2021, disaat situasi masih dalam masa pandemi Covid-19, Palinfo melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kelembagaan. Di tengah keterbatasan, pencapaian target kinerja telah dilaksanakan oleh dua bidang, yaitu Bidang Analisis dan Bidang Data dan Layanan Informasi. Target Kinerja Bidang Analisis memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pimpinan untuk menyikapi isu peradilan, selain itu melakukan kajian untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial. Sedangkan Bidang Data dan Layanan Informasi menghasilkan capaian target antara lain: pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi, pemutakhiran data dan informasi, sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi, monitoring media, penyusunan dan pencetakan bahan diseminasi publik di bidang yudisial, pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik dan laporan pengelolaan perpustakaan. Selain itu palinfo juga memiliki target kinerja terkait dengan peningkatan layanan perkantoran.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian per kegiatan masing-masing bagian sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan di awal tahun serta penyerapan

anggaran dalam mendukung proses kerja yang dilakukan tersebut untuk mencapai hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 8 Januari 2022

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,



R. Adha Pamekas

NIP 19690318 199603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana amanah tersebut, Pusat Analisis dan Layanan Informasi sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan serta program dan kegiatan Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk Periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Diharapkan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim".

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Analisis dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;

- b. Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan
- c. Komisi Yudisial;
- d. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
- e. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
- f. Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
- g. Penerjemahan lisan dan/atau tulisan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

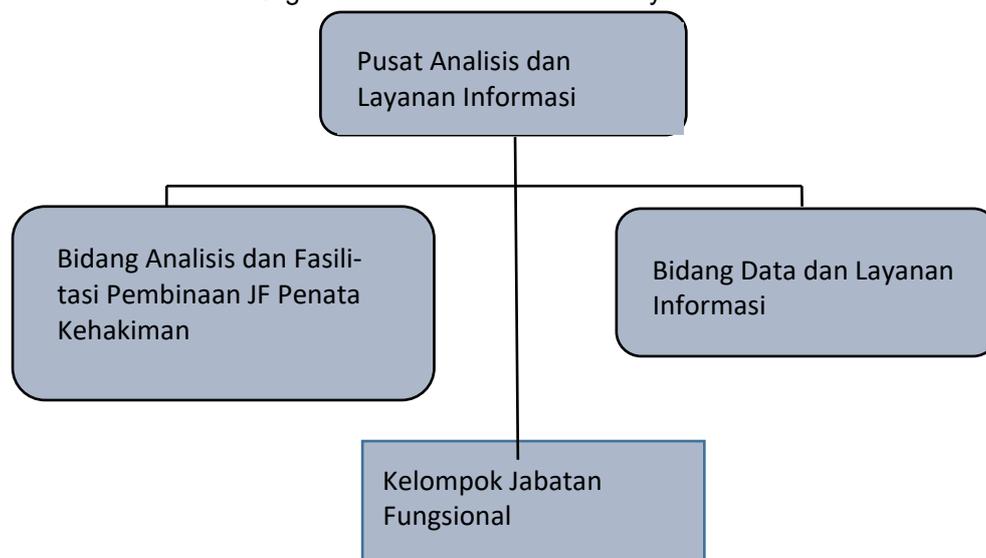
B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur organisasi dari Pusat Analisis dan Layanan Informasi terkini berdasarkan perubahan organisasi dan tata kerja tahun 2021 terdiri atas:

- a. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JF Penata Kehakiman;
- b. Bidang Data dan Layanan Informasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial sebagaimana berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi



Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan kajian terhadap hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, serta evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Sementara Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas penyusunan rencana, kegiatan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan basis data, penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan; pengelolaan perpustakaan; dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Analisis dan Layanan Informasi didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Pusat Analisis dan Layanan Informasi Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian			Berdasarkan Pendidikan			Berdasarkan Jenis Kelamin	
	CPN S	PNS	PPNPN S	D-III	S1	S2	L	P
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	24	1	4	13	8	14	11

C. ISU STRATEGIS

Bahwa pada tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024, dimana isu strategis prioritas dari Pusat Analisis dan Layanan Informasi di tahun ini disesuaikan dengan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024, yaitu melakukan strategi perencanaan

komunikasi publik, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* dan meningkatkan reputasi lembaga. Upaya yang dilaksanakan adalah penunjukkan Juru Bicara Komisi Yudisial. Namun, terkait implementasi komunikasi publik yang optimal dan pembentukan Tim Komunikasi Krisis masih belum terimplementasi secara baik sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024, Pusat Analisis dan Layanan Informasi mengukuhkan peran fungsinya melalui visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pemberdayaan stakeholder dan publik yang partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Analisis dan Layanan Informasi menjabarkannya dalam beberapa misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi *stakeholder* dan publik;
2. Meningkatkan integrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi serta kontribusi pencapaian Pusat Analisis dan Layanan Informasi pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis. PK pertama ditetapkan pada Februari 2021.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Awal Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Persentase aplikasi yang terintegrasi	40%
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001

3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

Kemudian, pada bulan Agustus terdapat perubahan terhadap perjanjian kinerja (PK) di atas yang salah satunya disebabkan adanya perbaikan nomenklatur indikator kinerja, perubahan target, dan penambahan anggaran terhadap program yang dimintakan untuk dijalankan oleh Palinfo. Indikator kinerja pengembangan aplikasi yang terintegrasi mengalami perubahan target yang awalnya persentase (40%) menjadi satuan aplikasi (3 aplikasi). Penambahan anggaran dilakukan untuk sasaran kegiatan nomor 5 dengan indikator kinerja angka 1 sebesar Rp. 230.000.000,-. Pada PK awal, Palinfo hanya mengelola anggaran sebesar Rp. 5.780.130.000,-. Dengan adanya penambahan anggaran tadi maka pada PK perubahan Palinfo mengelola anggaran sebesar Rp. 6.010.130.000,-. Perubahan PK Palinfo disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

C. KONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

Kontribusi yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam hal untuk pencapaian sasaran program dan sasaran strategis lembaga, terdapat dalam sasaran program Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal KY, yaitu dalam program ‘Terlaksananya pemberdayaan *Stakeholder* dan Publik’ dan juga ‘Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif’. Indikator kinerja dari 2 sasaran program tersebut adalah berupa ‘Persentase kontribusi *stakeholder* KY dan Publik’ dengan target yang ditetapkan sebesar 55% dan juga ‘Persentase pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang lembaga’ dengan target sebesar 80%. Dari sasaran program Pusat Analisis dan Layanan Informasi yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal tersebut, diharapkan dapat mendukung Penetapan Kinerja bagi lembaga, dimana sasaran program yang ingin dicapai ada 2 (dua) program, yaitu ‘Meningkatnya Integritas Hakim’ dimana indikator kinerjanya berupa pengukuran Indeks Integritas Hakim dengan target yang ditetapkan sebesar 7,04. Sedangkan sasaran program bagi lembaga yang ke-2 adalah berupa ‘Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal’ yang mana indikator kinerja dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu ‘Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga mencapai predikat Sangat Baik’ dengan target yang ditetapkan adalah ‘Baik’ dan juga indikator kinerja ‘Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A” di tahun 2024’ dengan target yang akan dicapai adalah “A”. Berikut merupakan data tabel terkait dengan sasaran program dalam penetapan kinerja bagi Sekretaris Jenderal dan juga lembaga KY:

a. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Terlaksananya pemberdayaan <i>Stakeholder</i> dan Publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> KY dan Publik	55%	Rekapitulasi jumlah <i>stakeholder</i> dan publik KY
2	Terlaksananya Inte-	Persentase pem-	80%	Rekapitulasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
	grasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	anfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang lembaga		jumlah aplikasi yang dihasilkan

b. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,04	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

D. RENCANA KERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2021 berdasarkan Renja 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Renja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2021

3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		6.010.130.000
3868.EAA	Layanan Perkantoran	1 lay	3.883.700.000
3868.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 lay	3.883.700.000
3868.EAJ	Layanan Data dan Informasi	5 lay	1.426.430.000
3868.EAJ.001	Layanan Pengelolaan Infrastruktur TIK	1 lay	370.197.000
3868.EAJ.002	Laporan hasil Pemutakhiran sistem Informasi	1 lay	90.090.000
3868.EAJ.003	Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK	1 lap	204.883.000
3868.EAJ.004	Bahan diseminasi Informasi Publik	1 lay	361.420.000
3868.EAJ.005	Layanan Keterbukaan Informasi	1 lay	399.840.000
3868.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	11 dok	700.000.000
3868.FAI.001	Dokumen hasil kajian Kelembagaan	1 dok	209.610.000
3868.FAI.002	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	10 put	490.390.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian pelaksanaan kegiatan Pusat Analisis dan Layanan Informasi pada tahun 2021 telah mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%	50%	100%
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001	ISO 27001	100%
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%
4	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif	Informatif	106,13%
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif	positif	100%

5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%	17%	113,33%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan	1 laporan	100%
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000	45.000	100%
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas	Puas	100%

Dari 10 indikator kinerja yang mendukung 6 sasaran kegiatan sebagaimana di atas, seluruh indikator telah berhasil mencapai target. Berikut ini adalah uraian penjelasan terhadap pencapaian target kinerja sasaran kegiatan tersebut:

1. **Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi**

Untuk sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 ditargetkan 3 sistem informasi yang terintegrasi, yaitu: 1). Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM); 2). Pemutakhiran Sistem Informasi Pendaftaran Online pada proses Seleksi Calon Hakim Agung; dan 3). Sistem Informasi Manajemen Investigasi. Palinfo berhasil merealisasikan integrasi ketiga sistem informasi di atas. Hal ini berarti terdapat pencapaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Ketiga aplikasi tersebut mendukung pengintegrasian data rekam jejak hakim yang ada di Komisi Yudisial. Database dari ketiga aplikasi tersebut sudah terintegrasi dan sudah terkoneksi satu sama lain. Sehingga, dalam pemanfaatan data baik untuk mendukung Seleksi Calon hakim Agung atau pelaksanaan tugas-tugas investigasi sudah bisa dimanfaatkan.

Namun, secara penganggaran pada tahun 2021 belum dapat mengakomodir proses integrasi dari ketiga aplikasi tersebut. Dari tiga target aplikasi yang terintegrasi hanya satu aplikasi yang diakomodir dalam anggaran tahun 2021, se-

dangkan dua aplikasi lainnya ditumpangkan dalam program lain agar pencapaian target dapat terlaksana.

Gambar 3.1

Tampilan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Ok	Nov	Des	Jumlah
1	Pengaduan Langsung	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2	Pengaduan via Pos	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3	Pengaduan via website	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
4	Penerimaan Informasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima		46	0	46										
5	Penerimaan Tindakan	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Total Penerimaan Laporan dan Tindakan		75	0	75										

Persentase pencapaian tersebut sesuai dengan formula hitung yaitu hasil TIK yang berhasil diintegrasikan: hasil TIK yang harus diintegrasikan x 100%.

Selain itu pada sasaran kegiatan ini juga ditargetkan adanya pemutakhiran data dan informasi dengan persentase sebesar 50%. Formula hitung untuk pencapaian target pemutakhiran data dan informasi dimaksud yaitu hasil data yang berhasil dimutakhirkan: hasil data yang harus dimutakhirkan x 100%. Pemutakhiran data dan informasi dimaksud adalah untuk data calon hakim agung (CHA) dan validasi data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Realisasi dari target tersebut didapat dengan membandingkan antara jumlah data CHA yang ada dengan yang dimutakhirkan melalui aplikasi Sistem Informasi Calon Hakim Agung dan validasi data Dukcapil. Dari 8116 data hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial telah dilakukan update sekitar 4200 data yang bersumber dari data CHA, data pelaporan masyarakat, data investigasi, data peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim (PKH) dan data dukcapil yang

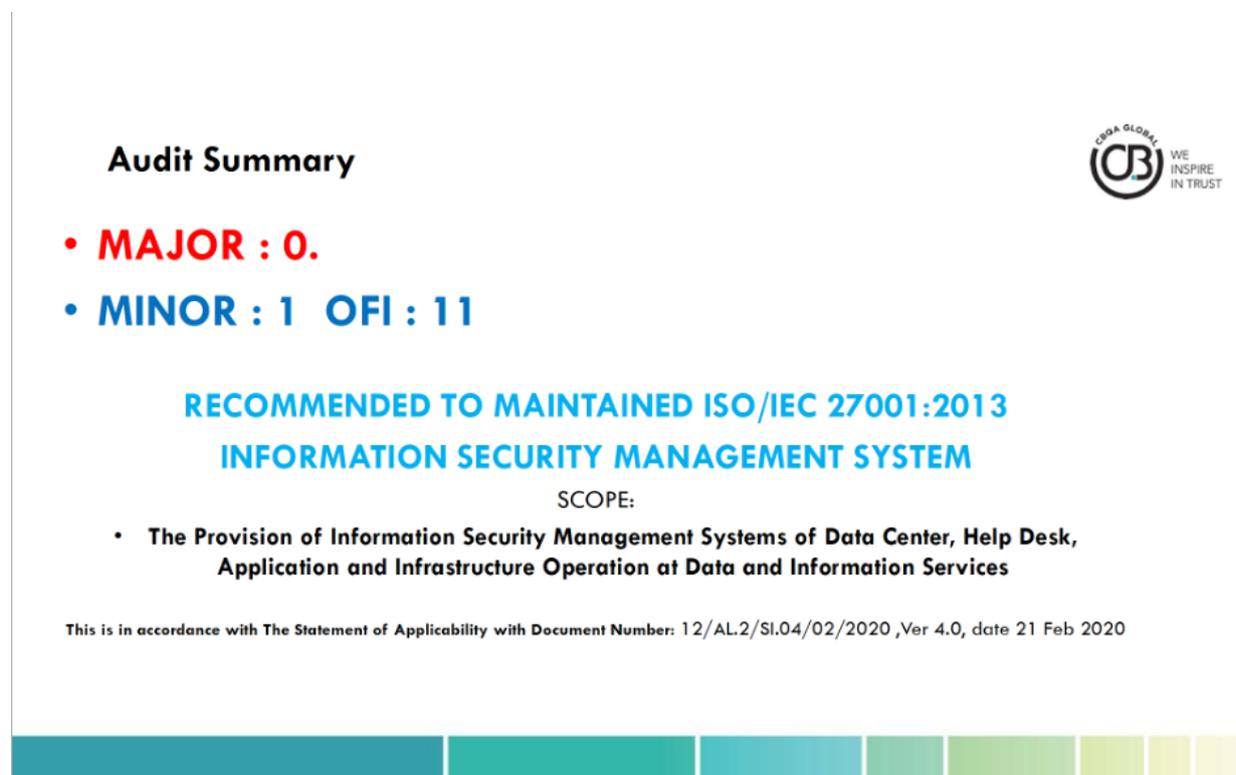
sudah divalidasi. Dari perbandingan tersebut didapatkan bahwa persentase pemutakhiran data sebesar 51,75 %.

2. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO 27001:2013. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan komitmen Komisi Yudisial pada aspek keamanan informasi yang mencakup aspek Confidentiality, Integrity, Availability (CIA).

Gambar 3.2

Tampilan Keterangan Mempertahankan Sertifikat ISO 27001:2013



Target dari sasaran kegiatan ini pada tahun 2021 adalah mempertahankan sertifikat ISO 27001:2013. Dibandingkan dengan tahun 2020, dilihat dari temuan, terkait implementasi SMKI untuk bidang data dan layanan informasi cenderung semakin baik. Hal ini terlihat dari perbandingan temuan tahun 2020 dan tahun 2021. Di tahun 2020 jumlah temuan ada 11 Minor, sedangkan untuk tahun 2021 ada 1 minor. Dari Data tersebut dapat diasumsikan untuk kesesuaian implementasi SMKI dengan standar yang ada semakin meningkat. Namun untuk capaian tetap sama dengan capaian 100% dengan indikator sertifikat ISO 27001:2013

dengan ruang lingkup data center, help desk, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Komisi Yudisial adalah:

- Pembentukan struktur organisasi
- Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur
- Sosialisasi Dokumen dan Awareness SMKI
- Evaluasi dan Monitoring Implementasi SMKI
- Internal Audit
- Tinjauan Manajemen
- Audit Sertifikasi SMKI

Untuk implementasi dimulai dengan penyiapan dan pembentukan struktur organisasi dan dilanjutkan dengan pengumpulan *record* dalam bentuk data dukung serta melakukan sosialisasi. Sebelum pelaksanaan audit eksternal terlebih dahulu dilakukan internal audit yang bekerjasama dengan Bidang Kepatuhan Internal di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Dari hasil audit internal lalu dilakukan tinjauan manajemen lalu dilanjutkan dengan eksternal audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Audit internal sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013 dilakukan pada tanggal 27 s.d 29 Oktober 2021, sedangkan audit eksternal sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013 dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 30 November 2021. Untuk mendukung implementasi SPBE, audit SMKI ISO 27001:2013 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi SPBE 2021. Adapun untuk hasil SPBE tahun 2021 Komisi Yudisial memperoleh nilai Cukup dengan nilai 2,21.

3. Terlaksananya penelitian dan pengkajian

Indikator kinerja Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian adalah dihasilkannya 3 rekomendasi penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2021, Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah berhasil mencapai 3 rekomendasi tersebut, yaitu:

- a. Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dilakukan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Permenpan

No.84 Tahun 2020). Dalam Permenpan No. 84 Tahun 2020, belum diatur secara jelas mengenai letak unit pembina dari jabatan fungsional penata kehakiman. Sehingga, Komisi Yudisial menganggap perlu untuk melakukan kajian tersebut untuk menentukan letak unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman. Dalam membuat kajian ini, Bidang Analisis melakukan kerjasama dengan Subbagian Hukum dan Organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, serta juga melakukan studi perbandingan terhadap 2 instansi yang juga memiliki jabatan fungsional yang sifatnya baru, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil Kajian ini telah dipaparkan di depan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan jajaran Pimpinan Unit Kerja Eselon II, serta disampaikan dan dipaparkan di depan Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- Mengusulkan peletakan fungsi Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman untuk sementara dilekatkan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi, secara spesifik pada Bidang Analisis yang kemudian akan diubah nomenklaturnya menjadi Bidang Analisis dan Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- Skema pertama yang diusulkan oleh Komisi Yudisial antara lain dengan disertai penambahan 2 (dua) Subbidang (setingkat eselon IV), yakni Subbidang Analisis dan Subbidang Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.
- Skema kedua, minimal ada penambahan satu Subbidang yaitu Subbidang Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di bawah Bidang Analisis dan Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Rekomendasi ini telah diterima dan diimplementasikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dengan persetujuan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakni sebagai dasar perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan memunculkan struktur Subbidang Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Pusat Analisis dan Layanan Informasi yang dituangkan ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Namun perlu dicatat, Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang setingkat eselon IV bersifat sementara, hal ini dikarenakan Komisi Yudisial wajib menjalankan proses penyetaraan/inpassing Jabatan Fungsional sampai dengan Desember 2022. Hadirnya subbidang setingkat eselon IV ini masih relevan dengan usulan reorganisasi dan penyederhanaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang saat ini masih dalam proses.

b. Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial

Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno dilakukan terhadap 21 Putusan Sidang Pleno yang terdiri dari 2 jenis kasus, yakni kasus asusila dan kasus korupsi/gratifikasi, yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial dalam rentang tahun 2018-2020. Tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk memberikan dukungan kajian dari sisi akademik/ilmiah dan menjelaskan disparitas putusan sidang pleno sebagaimana yang diungkapkan dalam permasalahan kajian. Dalam membuat kajian tersebut, Bidang Analisis melakukan konsultasi dengan akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang memiliki pengalaman dalam melakukan riset terhadap putusan pengadilan. Hasil kajian ini telah disampaikan kepada Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- Membuat pedoman yang berisi tentang klasifikasi dari masing-masing jenis sanksi yang ada pada masing-masing tingkatan sanksi.
- Membuat pedoman yang berisi indikator-indikator seperti apa bagi hakim Terlapor untuk dapat diberikan faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan yang sesuai dengan masing-masing jenis sanksi tersebut.
- Membuat pedoman yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Sidang Pleno yang dapat melengkapi perihal Sidang Pleno yang telah diatur dalam Peraturan KY RI Nomor 12 Tahun 2015.

- Komitmen yang kuat dari masing-masing anggota Majelis Sidang Pleno untuk melaksanakan pedoman tersebut, apabila pedoman sudah terbentuk.

Rekomendasi ini telah diterima dan akan diimplementasikan dengan adanya rencana tindak lanjut berupa pembentukan pedoman-pedoman yang diperlukan.

c. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Selama Tahun 2021, Kegiatan Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi telah memilih 10 putusan (7 yurisprudensi dan 3 putusan yang menarik). Kesepuluh putusan tersebut dilengkapi dengan 20 putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa benar setiap yurisprudensi haruslah diikuti oleh minimal 2 putusan lain. Selain melengkapi putusan yang mengikuti kaidah yurisprudensi, 10 putusan tersebut juga diperkaya dengan 30 anotasi yang dilakukan oleh dosen dari berbagai perguruan tinggi yang tentunya kredibel. Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, namun lebih kepada memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Tiga langkah dalam substansi karakterisasi dilakukan dengan tujuan memperkaya referensi terkait dengan putusan bagi hakim secara khusus dan masyarakat secara umum. Pada program karakterisasi diperoleh total sebanyak 60 dokumen. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi memiliki rekomendasi sebagai berikut:

- Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan, yakni sistem informasi *karakterisasi.komisiyudisial.go.id* dan juga ke aplikasi Karakterisasi Putusan berbasis android dan ios;
- Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat untuk memberikan referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Rekomendasi ini telah diterima mengingat program karakterisasi putusan berbasis aplikasi akan dilanjutkan pada tahun 2022. Hal penting dari keberlangsungan program ini juga terlihat dari statistik pengunjung situs dan pengguna serta unduhan hasil karakterisasi yang cukup tinggi sebanyak 23.026 *ip address*.

Sebagaimana digambarkan dalam ketiga kegiatan tersebut, maka diperoleh 3 rekomendasi yang didapat dari masing-masing kegiatan, dimana 1 rekomendasi merupakan perwakilan dari masing-masing kegiatan penelitian dan pengkajian. Ketercapaian Palinfo untuk sasaran kegiatan ini diperoleh berdasarkan perhitungan: jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang dihasilkan dibagi jumlah rekomendasi penelitian dan pengkajian yang ditargetkan x 100%, maka didapatkan hasil $(3:3) \times 100 \% = 100\%$.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada Tahun 2021 dihasilkan 3 rekomendasi penelitian dan pengkajian (100 %). Sementara itu, pada Tahun 2020, diperoleh 1 laporan (rekomendasi) penelitian dan pengkajian tentang masa jabatan Pimpinan Komisi Yudisial. Adapun pada Tahun 2022 target yang ditetapkan dalam renstra untuk indikator kinerja sasaran kegiatan ini juga sama yaitu 3 rekomendasi. Dengan kesamaan target ini, di Tahun 2022 Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi akan melakukan bentuk upaya yang kurang lebih sama dengan Tahun 2021 sebagai strategi untuk mencapai target di Tahun 2022.

Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam strategi mencapai target Tahun 2021, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
 - a. Bidang Analisis telah melakukan studi perbandingan ke dua instansi yang juga memiliki jabatan fungsional baru, yakni Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan juga Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempelajari penempatan unit pembina pada kedua instansi tersebut;

- b. Bidang Analisis telah melakukan konsultasi dengan Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pembuatan naskah kajian.

2. Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial

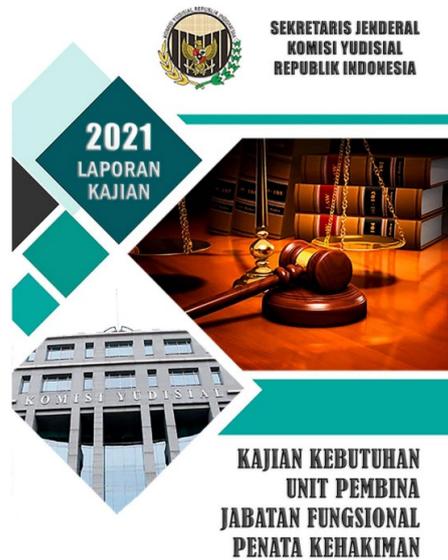
- a. Bidang Analisis telah melakukan kerjasama dengan Subbagian Persidangan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk meminta izin menulis tentang materi kajian serta meminta Putusan Sidang Pleno yang dipergunakan sebagai data primer dalam kajian yang dilakukan.
- b. Bidang Analisis telah melakukan konsultasi dengan pakar yakni Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang merupakan pakar yang berpengalaman di bidang riset putusan pengadilan.

3. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

- a. Bidang Analisis telah melakukan kerjasama dengan banyak akademisi yang berasal dari berbagai macam perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi.
- b. Bidang Analisis telah melakukan konsultasi dengan beberapa pakar yakni akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap tulisan anotasi putusan yurisprudensi yang telah masuk. Sehingga, putusan yang telah diunggah ke dalam sistem informasi, dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

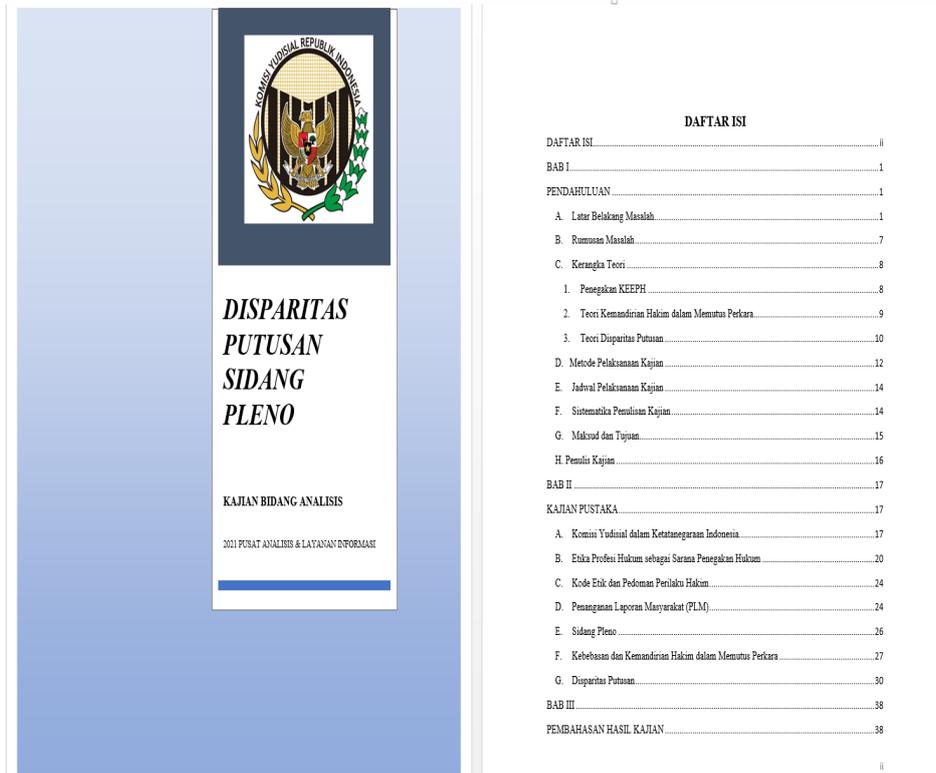
Gambar 3.3

Laporan Kajian Kebutuhan Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman



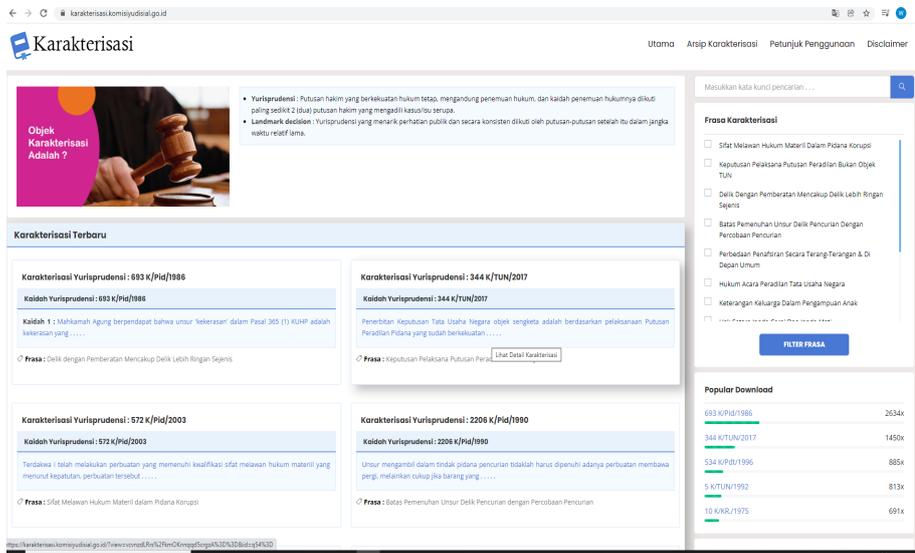
Gambar 3.4

Laporan Kajian Disparitas Putusan Sidang Pleno



DAFTAR ISI	
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kerangka Teori	8
1. Penegakan KEEPH	8
2. Teori Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara	9
3. Teori Disparitas Putusan	10
D. Metode Pelaksanaan Kajian	12
E. Jadwal Pelaksanaan Kajian	14
F. Sistematika Penulisan Kajian	14
G. Maksud dan Tujuan	15
H. Penulis Kajian	16
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
A. Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia	17
B. Etika Profesi Hakim sebagai Sarana Penegakan Hukum	20
C. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	24
D. Penanganan Laporan Masyarakat (PLM)	24
E. Sidang Pleno	26
F. Kebebasan dan Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara	27
G. Disparitas Putusan	30
BAB III	38
PEMBAHASAN HASIL KAJIAN	38

Gambar 3.5
Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan



Selain beberapa kegiatan mengikat di atas, Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi pada tahun 2021, telah melakukan beberapa kegiatan penunjang di luar sasaran kegiatan yang ada dalam PK Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi, yakni:

a. Webinar Internasional

- a) Webinar internasional dengan judul *Global Trends in The Status and Roles of Judicial Assistants and Future Developments in Indonesia* pada tanggal 07 Juni 2021. Webinar ini dihadiri melalui dua saluran, yakni Via zoom webinar (382 peserta) dan via live streaming youtube (82 peserta)

Gambar 3.6

Webinar Internasional *Global Trends In The Status and Roles of Judicial Assistants and Future Developments in Indonesia*



- b) Webinar internasional dengan judul *The Judicial Commission and the Independence of the Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium* pada tanggal 12 Oktober 2021. Webinar ini dihadiri melalui dua saluran, yakni via zoom webinar dengan total sebanyak 230 peserta.

Gambar 3.7

Webinar Internasional *The Judicial Commission and the Independence of the Judiciary: Lessons Learned from Indonesia and Belgium*



b. Webinar Nasional

- a) Webinar nasional tentang Direktori Putusan MA, dihadiri sebanyak 134 orang peserta.
- b) Webinar Nasional tentang SIPP MA, dihadiri sebanyak 65 orang peserta.
- c. Mengurus proses untuk menjadi Jabatan Fungsional (JF) Analis Hukum bagi para staf di Bidang Analisis.

Dimulai sejak bulan Desember 2020 hingga Maret 2021, Bidang Analisis melakukan kerjasama dengan Subbagian Kepegawaian pada Biro Umum dan juga Badan Pembinaan Nasional (BPHN) dalam rangka mencari informasi mengenai JF Analis Hukum, kemudian dilanjutkan dengan menghitung formasi yang dibutuhkan di Bidang Analisis, dan menyiapkan persyaratan-persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Hingga pada akhirnya pada bulan April 2021, para staf Bidang Analisis yang telah memenuhi syarat, mengikuti

ujian kompetensi sebagai syarat kelulusan untuk diangkat menjadi JF Analis Hukum. Pada bulan Juli 2021, para staf Bidang Analisis dinyatakan lulus ujian kompetensi sebagai JF Analis Hukum. Puncaknya, pada tanggal 18 Oktober 2021, staf Bidang Analisis telah dilantik menjadi JF Analis Hukum.

Gambar 3.8
Pelantikan Pejabat Fungsional Analis Hukum



d. Ikut serta dalam pembuatan soal kasus hukum seleksi Calon Hakim Agung (CHA).

Pada akhir semester II tahun 2021, Bidang Analisis dalam hal ini para fungsional Analis Hukum dilibatkan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim dalam proses seleksi Calon Hakim Agung untuk membantu pembuatan soal kasus hukum Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung untuk kamar pidana, perdata agama, dan tata usaha negara (TUN) khusus pajak serta Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung.

Gambar 3.9
Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung



4. Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung

Tahun 2021 ini Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan predikat “Informatif” kepada Komisi Yudisial untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik, dengan perolehan nilai 95,41. Palinfo ditargetkan untuk mendapatkan predikat “Menuju Informatif” (range nilai 80-89,9) dari KIP dari sasaran kegiatan ini. Hal ini berarti Komisi Yudisial berhasil meningkatkan prestasi dalam anugerah Keterbukaan Informasi Publik dibanding tahun 2020 yang memperoleh predikat “Menuju Informatif”. Predikat “Informatif” ini merupakan kali pertama diterima oleh KY sejak penghargaan ini diberikan oleh KIP sejak tahun 2014. Untuk jadwal dan tahapan penilaian tahun 2021, KIP memulai dengan sosialisasi secara virtual kepada badan publik pada 15-16 Juni, pengisian kuesioner oleh peserta melalui aplikasi dari 23 Juni – 23 Juli, verifikasi oleh tim pada 28 Juli – 24 Agustus dilanjutkan dengan koreksi atas verifikasi pada 25 Agustus – 9 September, dan presentasi tanggal 29 dan 30 September, kemudian tanggal 1, 4, 5 dan 6 Oktober 2021.

Tahapan presentasi juga sudah termasuk pengiriman video dari setiap peserta yang mengisi kuesioner ke KIP dengan batas pengiriman 15 September. Acara puncak Anugerah KIP 2021 diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2021. Penghargaan ini adalah bentuk implementasi Komisi Yudisial terhadap keterbukaan informasi publik. Komisi Yudisial juga akan lebih meningkatkan pelayanan informasi publik agar akses publik terhadap informasi semakin mudah, terbuka, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik merupakan perlindungan hak masyarakat atas informasi publik untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Komisi Yudisial akan memberikan inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi. Komisi Yudisial akan terus meningkatkan perbaikan tata kelola keterbukaan informasi publik yang didukung inovasi dan kolaborasi, serta adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 3.10
Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



Gambar 3.11
Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

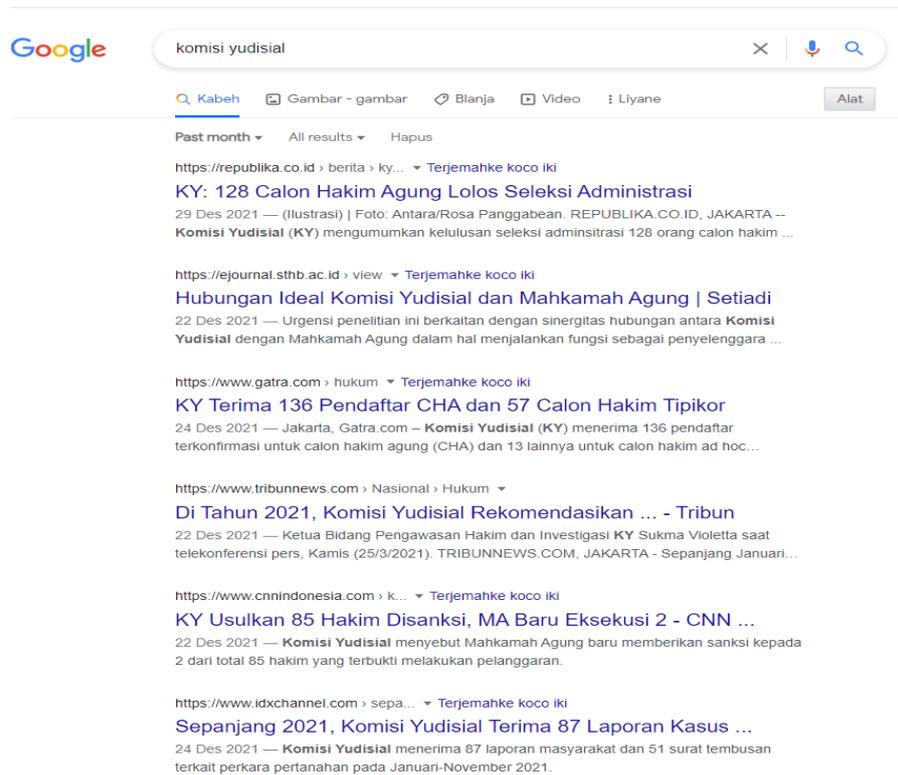


Selain itu, dari sasaran kegiatan ini Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga ditargetkan untuk mendapatkan kategori publisitas positif media monitoring. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan menghasilkan sebuah informasi tentang reputasi bisnis di mata media cetak dan online. Dilakukan secara terus-menerus untuk melacak publikasi iklan sekaligus media sosial. Layanan pemantauan ini membantu perusahaan mengelola reputasi serta membandingkannya dengan industri lain. Khususnya bagi perusahaan atau organisasi yang menargetkan promosinya kepada khalayak media. Sebagai contoh, lembaga memanfaatkan social media monitoring Indonesia sebagai alat untuk mengetahui reputasinya di media. Singkatnya, media monitoring dapat dijadikan acuan bagi lembaga dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan yang tepat. Pengukuran pada aspek ini dilakukan dengan monitoring terhadap 224 media daring dan media cetak. Pengukuran atas media monitoring memiliki indikator antara lain jumlah berita tentang Komisi Yudisial, aktor pemberitaan (internal KY dan eksternal KY), topik teratas terkait Komisi Yudisial dan kecenderungan pemberitaan Komisi

Yudisial (negatif atau positif). Berdasarkan indikator tersebut, didapatkan hasil “kategori positif” untuk publisitas media bagi Komisi Yudisial. hal ini melanjutkan tren kategori positif media monitoring Komisi Yudisial dari tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun 2020.

Gambar 3.12

Penelusuran pemberitaan media tentang Komisi Yudisial



5. Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim.

Indikator pertama dari sasaran kegiatan ini adalah persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi sebesar 15%. Pengukuran dilakukan dengan menilai pemahaman peserta tentang Komisi Yudisial melalui *pre test* dan *post test* yang dilakukan saat kegiatan edukasi publik. Formula hitungnya adalah jumlah orang/lembaga yang sampai pada level paham: jumlah orang/lembaga yang mengikuti edukasi x 100%. Realisasi yang tercapai didapatkan bahwa 16,5% publik yang berasal dari tokoh masyarakat dan unsur pemerintah daerah paham mengenai tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, untuk publik dari unsur pemuda dan/atau pelajar sebesar 17,5% dikategorikan paham tentang tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Secara rata-rata tingkat pemahaman peserta

edukasi publik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $16,5\%$ ditambah $17,5\%$ dibagi 2 maka diperoleh hasil sebesar 17% . Hal ini menandakan bahwa realisasi pemahaman peserta edukasi publik tentang tugas dan fungsi Komisi Yudisial telah melampaui target yang dibebankan. Pengukuran publik yang berasal dari tokoh masyarakat dan unsur pemerintah daerah dilakukan pada Kamis (23/9) di Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta edukasi publik Komisi Yudisial yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan PKK desa dijadikan sampel responden. Pengukuran publik yang berasal dari unsur pemuda dan/atau pelajar dilakukan kepada 100 (seratus) siswa kelas XI SMAN Sumatera Selatan, pada Kamis (25/11).

Gambar 3.13

Edukasi Publik di Soreang, Kabupaten Bandung



Gambar 3.14

Edukasi Publik di SMAN Sumatera Selatan



Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu adanya 1 laporan pengelolaan perpustakaan. Target ini berhasil dicapai dengan adanya 1 laporan pengelolaan perpustakaan, sehingga capaiannya mencapai 100%. Kegiatan Perpustakaan di Tahun 2021 merupakan upaya tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 105B/HP/XVI/05/2019 yang menyebutkan sebesar Rp959.904.466 tidak memiliki pencatatan yang handal sehingga BPK merekomendasikan untuk melakukan inventarisasi ulang atas seluruh buku di Perpustakaan yang dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Selanjutnya Pusat Analisis dan Layanan Informasi berkoordinasi dan bekerjasama dengan Biro Umum khususnya Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk melakukan inventarisasi ulang terhadap aset Barang Milik Negara berupa Buku / Monograf. Sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER, terhitung bulan Maret Tahun 2021 kedudukannya menggantikan aplikasi SIMAK BMN, namun data yang dijadikan landasan untuk rekonsiliasi dengan data Buku Induk Komisi Yudisial tetap menggunakan data SIMAK BMN terhitung sejak bulan April

tahun 2019 lalu. Adapun upaya yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2021 pada internal Perpustakaan yaitu melakukan pembenahan aplikasi INLIS dengan mengimpor database dari aplikasi sebelumnya yaitu, SENAYAN dan juga melakukan pembenahan pencatatan katalogisasi pada aplikasi INLIS yang hasilnya kemudian dilakukan reinventarisasi ulang kedalam SAKTI.

Perpustakaan telah melakukan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian internal berupa buku dalam SIMAK BMN yang tidak ditemukan pada data Buku Induk KY (APLIKASI PERPUS INLIS). Temuan BPK pada LHP No.36B/HP/XVI/5/2020, "1.2 Sistem Pengendalian Aset, Aset Tetap lainnya berupa buku perpustakaan. Berikut tabel tindak lanjut yang telah dilakukan perpustakaan sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2021.

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Nomor 105B/HP/XVI/05/2019

Thn.	Jml temuan	Rek	Si-sa	Nominal Temuan	Nominal Pengurangan	Nominal sisa	Proses Tindak lanjut	
	(Eks)	(Eks)	(Eks)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
2019	5957	0	5957	959.904.466	0	959.904.466	1	Tim Perpustakaan melakukan pembenahan sistem aplikasi perpustakaan
							2	Tim Perpustakaan melakukan migrasi dan pembenahan database dari SENAYAN ke INLIS Lite Versi 3

							3	Tim Perpustakaan melakukan pengujian terhadap INLIS Lite Versi 3 dan sinkronisasi internal terhadap jaringan Komisi Yudisial
							4	Tim Perpustakaan berkoordinasi dengan bagian Kepatuhan Internal
2020	5957	1654	4291	959.904.466	313.195.928	646.708.538	1	Tim Perpustakaan melakukan progres rekonsiliasi data SIMAK BMN Tahun 2012 - 2018
							2	Tim Perpustakaan melakukan opname fisik buku
							3	Tim Perpustakaan melakukan kolektorial buku pinjaman
							4	Tim Perpustakaan berkoordinasi dengan Bagian Kepatuhan Internal

2021	5957	3229	2728	959.904.466	574.735.804	385.168.662	1	Tim Perpustakaan melakukan progres rekonsiliasi data SIMAK BMN Tahun 2006 - 2011
							2	Tim Perpustakaan berkoordinasi dengan Sub Bagian Perengkapan untuk update data Buku BMN pada Aplikasi SAKTI
							3	Tim Perpustakaan berkoordinasi dengan Bagian Kepatuhan Internal

Kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial di Tahun 2021 lebih terfokus pada tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 105B/HP/XVI/05/2019. Di tahun 2021 temuan tersebut banyak berkurang dan upaya reinventarisasi buku juga telah lebih dioptimalkan, berikut adalah analisis keberhasilan terhadap upaya tindak lanjut tersebut.

- a. Adanya dukungan kebijakan pimpinan terhadap pengelolaan aset BMN Perpustakaan sehingga, kegiatan lebih terfokus dan terarah untuk menindaklanjuti hasil temuan.
- b. Adanya dukungan kebijakan anggaran dan tenaga sumber daya manusia perbantuan dalam melakukan pengelolaan BMN Perpustakaan, sehingga memudahkan proses rekonsiliasi dan reinventarisasi.
- c. Adanya koordinasi yang baik antar unit dalam hal pengelolaan aset BMN Perpustakaan.

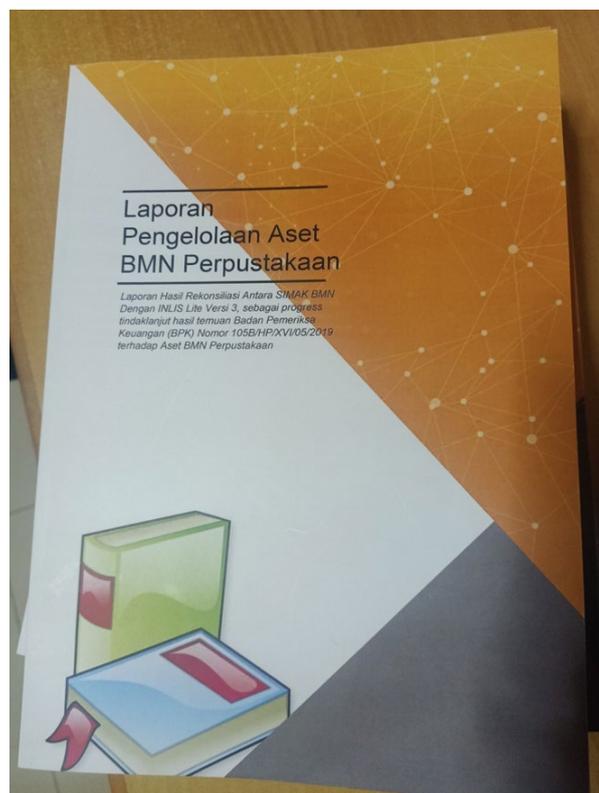
Sementara penghambat keberhasilan Perpustakaan antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang bersifat organik dalam pengelolaan perpustakaan khususnya dibidang IT, dan Pustakawan.
- b. Kurangnya instrumen pengawasan terhadap aset BMN Perpustakaan, hal ini cenderung menyulitkan proses pengelolaan di tahun – tahun berjalan.
- c. Kurangnya regulasi yang mengikat baik pengelola maupun pengguna perpustakaan dalam hal menggunakan aset perpustakaan.

SDM perpustakaan berjumlah satu orang untuk melakukan pengelolaan kurang lebih 8.000 eksemplar buku, hal ini terbantu dengan adanya sistem otomasi dalam aplikasi perpustakaan yang bernama INLIS Lite Versi 3, meski demikian untuk kegiatan yang bersifat kajian literasi menjadi kurang efektif dan cenderung belum dapat berjalan.

Dalam proses pengelolaan BMN Buku Perpustakaan, kegiatan ini menghasilkan 1 output laporan yang didalamnya terkait dengan laporan hasil rekonsiliasi antara data SIMAK BMN dengan Data INLIS Lite Versi 3, berikut adalah bukti fisik buku laporan perpustakaan Tahun 2021.

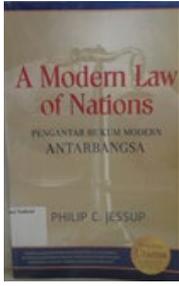
Gambar 3.15
Laporan Pengelolaan Aset Perpustakaan Komisi Yudisial



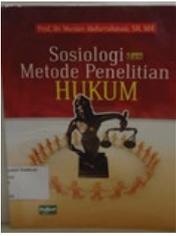
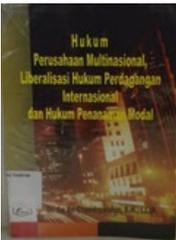
Kegiatan penunjang di luar Penilaian Kinerja seputar output laporan perpustakaan yaitu melakukan kegiatan opnam fisik BMN yang ada di Perpustakaan. Kegiatan ini dikategorikan sedikit berbeda karena, kegiatan opnam melibatkan perawatan aset yang berurusan dengan tugas dari Subbagian Perlengkapan di unit kerja Biro Umum. Meski demikian opnam fisik BMN menjadi keharusan yang penting untuk dilakukan sehingga pekerjaan tersebut dilakukan secara intensif dan koordinatif. Berikut adalah tabel hasil opnam fisik yang juga terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 105B/HP/XVI/05/2019.

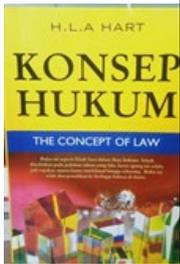
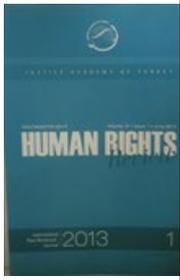
Tabel 3.3

HASIL OPNAM FISIK TERKAIT TEMUAN BPK TAHUN 2021

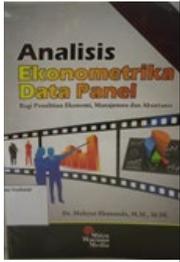
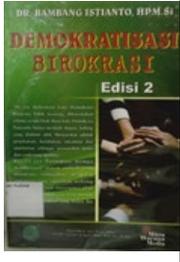
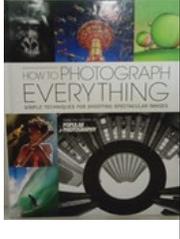
No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Thn. Terbit	Jml. Eks.	Gambar	Aktual
1	A Modern Law of Nations Ant	Zainal Arifin Heosein	CV. Henpriz	2012	5		5
2	Hukum Tata Negara dan Hukum	Ahmad Sukardja	CV. Henpriz	2012	3		3
3	Kamus Belanda-Indonesia	Hein Steinhauer, Susi Moeim	CV. Henpriz	2012	3		3

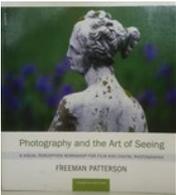
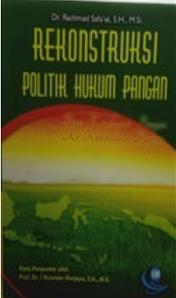
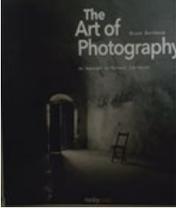
4	Kebijakan Kriminal Penanggguh	A. Widada Gunakaya	CV. Henpriz	2012	5		5
5	Pemidanaan Anak Dibawah Umur	Bunadi Hidayat	CV. Henpriz	2012	5	 	5
6	Penjara (Bukan) Tempat Anak	Muhammad Joni	CV. Henpriz	2012	5		5
7	Penyelesaian Sengketa Internasional	Sri Setianingsih Suwardi		2012	3		3
8	Perlindungan Anak di bawah Umur	Abdi Koro	CV. Henpriz	2012	5		
9	Sistem Keta-tanegaraan Indonesia	Abdy Yuhana	CV. Henpriz	2012	3		3

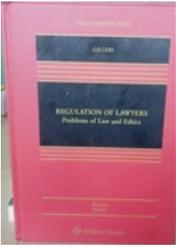
10	Sosiologi dan metode penelitian	ashgate	CV. Henpriz	2013	3		3
11	Harrods librarians glossary and reference book	Ashgate	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
12	Say No To Korupsi "Mengenal"	Yahya, Juni Syafrien/Cpp	CV. Dimensi Nusantara	2013	5		3
13	Hukum Perusahaan Multinasional	Chandrawulan/Alumni/2012	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		2
14	Membuat Surat Perjanjian	Sukandar, Dadang/Andi Pub	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		1
15	K.H.E.S. Edisi Revisi	PPHIM/Penada Media Group	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		9

16	Kompilasi UU Perpajakan Terlengkap	Fitriadi dkk/salemba 4	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		2
17	Cendekiawan dan kekuasaan d	Daniel, Dhakidae/P T Game	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		2
18	Introduction to The Study o	AV, Dicey/London/ 1952	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		
19	Reformasi MA Menuju Independensi	S, Djohansjah/ Kesaintblan	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		2
20	Konsep Hukum	H, LA, Hart dkk/ Nusa Medi	CV. Henpriz	2013	2		1
21	The Story Of Human Right:F	R, Ishay Micheline / Univer	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		3

22	Arok Dedes	Toer,Pramoedya Ananta /Ha	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
23	Arus Balik	Toer,Pramoedya Ananta /Ha	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
24	Bapak Bangsa 4 Serangkai pe	Tempo/Tempo	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		
25	Ishihara's Tests For Colour	Ishihara/Ishihara	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
26	Filsafat Ilmu Dalam Pandang	Husaini, Adian (Editor)	CV. Dimensi Nusantara	2013	2		
27	Legal System Of The World 4	Groler/Glolier	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
28	Encylopedia Of Crime,Police	Gramedia	CV. Dimensi Nusantara	2013	1		
29	Anak Kampung Yang keliling Dunia	Gozali Katian-da	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	2		2

30	Analisis Ekonometrika data dan Panel	Dr. Mahyus Ekananda,MM	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	3		3
31	Building Maintenance Occupational Competency Exam	Jack Rudman	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		
32	Demokrasi Birokrasi Ed2	Bambang Istianto	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	3		2
33	Events Exposed: Managing and Designing Special Events	Lena Malouf	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		1
34	How to Photograph Everything Popular Photography	The Editors of Popular Photography	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		1
35	Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia Sistem	PT.Pilar Yuris Ultima	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	5		5

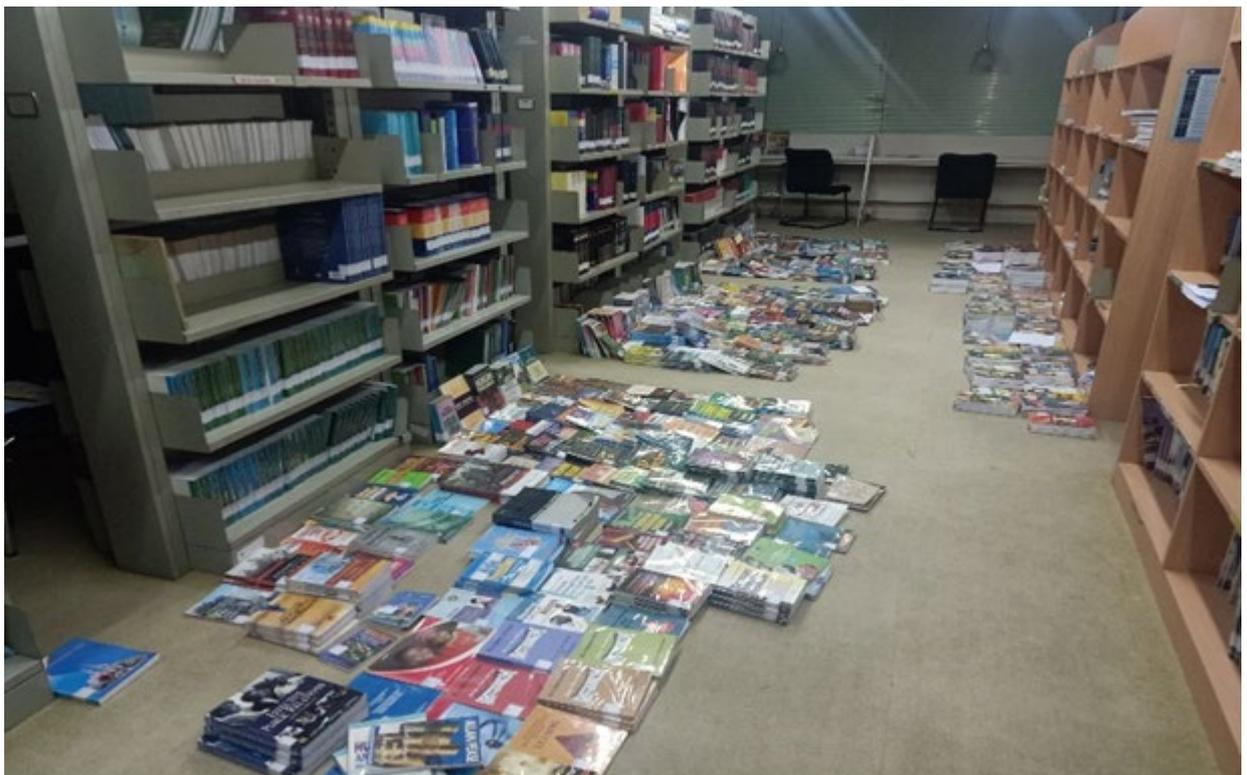
36	Photography and the Art of Seeing: A Visual Percep	Freeman Pat- terson	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		1
37	Rekontruksi Politik Hukum ketahanan Pangan Bebas	Rachmat Syafa'at, SH., Dr.	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		3
38	Delik-delik Tertentu (Speciale De- lictien) di Da- lam	Andi Hamzah	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	3		3
39	Spirit Hukum	Daniar, dkk	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	3		3
40	Strategic Management and Public Service Per- formance	Rhys Andrews, George Boyne, Jennifer Law, Richard	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	3		1
41	The Art of Photography: An Approach to Personal Ex	Bruce Barn- baum	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		1

42	Regulation of Lawyers: Problems of Law and Ethics	Stephen Gillers Wolters Kluwer	CV. Abadi Mitra Pustaka	2015	1		1
					102		87

Berdasarkan hasil opnam fisik diatas diketahui data jumlah buku yang masih dalam pencarian berjumlah 15 eksemplar atau 10 judul buku.

Gambar 3.16

Kegiatan Reinventarisasi Koleksi Buku Perpustakaan Komisi Yudisial



Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal Yudisial, 6.000 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kal-

ender, dan 35.000 bahan publikasi lainnya (stiker, leaflet, buku saku kode etik dan pedoman perilaku hakim). Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang menghasilkan 9.500 eksemplar cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya, maka capaian di tahun 2021 lebih baik atau sesuai target. Capaian jumlah cetakan pada tahun 2021 ini juga telah sesuai dengan target jangka menengah yang termuat dalam Renstra Komisi Yudisial.

6. Meningkatnya layanan perkantoran

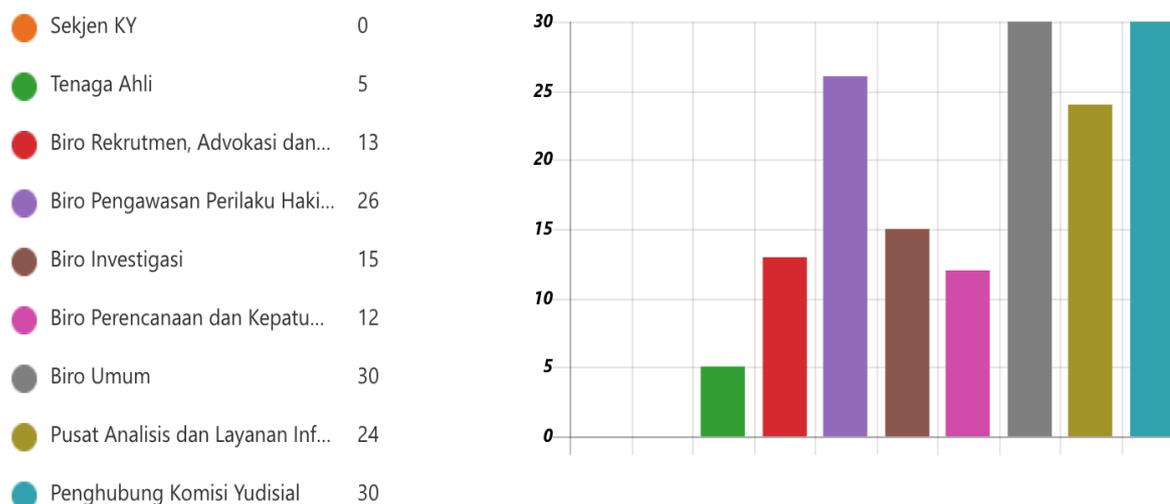
Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori “Puas” (range nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial semakin dirasakan para pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, antara lain:

- a. Persyaratan
- b. Sistem Mekanisme Prosedur
- c. Waktu Penyelesaian
- d. Biaya/ Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan
- i. Sarana Prasarana

Adapun hasil yang diperoleh bahwa tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar/Margin Error 5%, dengan N Populasi sebesar = 280 orang dan dengan minimum sampling responden sejumlah 155 orang.

Grafik 3.1
Sebaran Responden



Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif yang didasarkan pada panduan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Tabel 3.4
penghitungan kuesioner secara kuantitatif

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	Σ Nilai Soal	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
				Σ Soal Terisi				
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 155	574	3,70	3,47	538,5	B	Baik
	P2		503	3,24				
Sistem Mekanisme Prosedur	P3		0	0	3,05	473	C	Kurang Baik
	P4		0	0				
	P5		473	3,05				
Waktu Penyelesaian	P6		476	3,07	3,07	476	B	Baik
Biaya	P7		620	4	4	620	A	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		537	3,46	3,46	537	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	P9		540	3,48	3,48	540	B	Baik
Perilaku Pelaksana	P10		522	3,36	3,36	522	B	Baik
Penanganan Pen-	P11		0	0	3,27	507	B	Baik

gaduan, Saran dan Masukan	P12		507	3,27				
Sarana dan prasarana	P13		427	2,75	2,75	427	C	Kurang Baik
	P14		0	0				
	P15		0	0				
	P16		0	0				
	P17		0	0				
Nilai Indeks				3,32	83,16			
Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS			

*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (esai)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat kepuasan pengguna layanan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi berada pada kategori B (Baik) dengan nilai 83,16 atau bisa disamakan dengan kategori PUAS sebagaimana merujuk pada tabel Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2021.

Dari sembilan indikator yang dilakukan penilaian secara umum pengguna layanan mengapresiasi layanan yang diberikan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi, hal tersebut dapat dilihat dari hanya ada dua indikator yang bernilai kurang baik. Adapun dua indikator tersebut adalah terkait sistem mekanisme prosedur layanan dan sarana prasarana layanan. Dari nilai C (kurang baik) berada diambang atas batas menuju nilai B (Baik). Hal ini menjadi catatan untuk dilakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang berkaitan dengan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Apabila capaian kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagaimana di atas dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah renstra Komisi Yudisial Tahun 2020 s.d 2024 tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun 2021	Capaian (%)
-----	------------------	-------------------	--	------------------------------------	-------------

1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100
		2. Presentase pemutakhiran data dan informasi	60%	50%	83,33
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001	ISO 27001	100
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100
4	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif	Informatif	100
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif	positif	100
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase peningkatan pemahaman peserta edukasi publik	15%	17%	113
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan	1 laporan	100
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000	45.000	100
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas	Puas	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Palinfo 2020-2024, maka secara umum indikator yang telah mencapai target jangka menengah. Meskipun terdapat indikator yang pencapaiannya belum 100%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai 100% pada tahun terakhir periode Renstra Palinfo 2020-2024.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sekitar 90% SDM yang ada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) telah menduduki jabatan fungsional tertentu diantaranya Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Hukum dan Penerjemah yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya meskipun di tahun 2021 minim sekali kesempatan untuk pengembangan kompetensi kepada SDM yang ada di Palinfo.

b. Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2021 Palinfo mendapatkan anggaran sebesar Rp6.010.130.000,- dengan serapan sebesar Rp5.849.793.330,- atau sekitar 97,33%. Terdapat efisiensi penyerapan anggaran sebesar 2,67%. Efisiensi yang dilakukan tersebut diantaranya dalam penggunaan sumber daya manusia melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta serta narasumber yang pro bono karena statusnya sebagai pejabat negara

c. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, Palinfo juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

8. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penggunaan Teknologi Informasi merupakan penunjang utama dalam keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2021. Dukungan IT dimasa pandemi Covid-19 sangat efektif agar pelayanan kepada internal maupun eksternal tetap maksimal.

Adapun pelayanan kepada internal diantaranya penyiapan aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh internal selama melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home*), penyiapan *video conference*, dll. Selain itu, pelayanan kepada pihak eksternal diantaranya penerimaan pengaduan laporan masyarakat terkait

dugaan pelanggaran kode etik hakim secara online, pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung secara online, dll.

B. REALISASI CAPAIAN ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2021 Pusat Analisis dan Layanan Informasi memperoleh anggaran sebesar Rp6.010.130.000,- dengan serapan sebesar Rp5.849.793.330,- atau sekitar 97,33%. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Palinfo 2021

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1		2	3	4
				%
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp6.010.130.000	Rp5.849.793.330	97,33
3868.EAA	Layanan Perkantoran	Rp3.883.700.000	Rp3.860.520.531	99,40
3868.EAA.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp3.883.700.000	Rp3.860.520.531	99,40
3868.EAJ	Layanan Data dan Informasi	Rp1.426.430.000	Rp1.313.698.844	92,10
3868.EAJ.001	Layanan Pengelolaan Infrastruktur TIK	Rp370.197.000	Rp330.839.734	89,37
3868.EAJ.002	Laporan Hasil Pemutakhiran Sistem Informasi	Rp90.090.000	Rp82.100.000	91,13
3868.EAJ.003	Laporan Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK	Rp204.883.000	Rp180.088.789	87,90
3868.EAJ.004	Bahan Diseminasi Informasi Publik	Rp361.420.000	Rp352.772.939	97,61
3868.EAJ.005	Layanan Keterbukaan Informasi	Rp399.840.000	Rp367.897.382	92,01
3868.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	Rp700.000.000	Rp675.573.955	96,51
3868.FAI.001	Dokumen hasil kajian Kelembagaan	Rp209.610.000	Rp208.164.423	99,31
3868.FAI.002	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	Rp490.390.000	Rp467.409.532	95,31

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi ini merupakan uraian singkat yang menggambarkan kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi di tahun 2021 dalam mendukung penguatan kelembagaan. Kesimpulannya bahwa pada tahun 2021 Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penerbitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2020 s.d 2024, setiap bulannya akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pusat Analisis dan Layanan Informasi Periode 2020 s.d 2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Organisasi sebagaimana dituangkan dalam Tujuan Komisi Yudisial, yaitu *“Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”*.

Renstra Pusat Analisis dan Layanan Informasi Periode 2020 s.d 2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan internal Palinfo sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan dengan akuntabel dan senantiasa berorientasi pada manajemen peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam strategi Komisi Yudisial.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi ini disusun dengan sebenarnya, dan diharapkan dapat dipergunakan dalam rangka untuk melakukan evaluasi secara bersama, sehingga di kemudian hari capaian akuntabilitas kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi akan semakin baik dari yang dihasilkan sekarang, dan harapannya dapat didukung dengan alokasi penganggaran yang semakin baik dan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

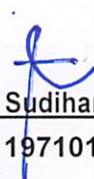
Nama : R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar., S.H., M. Hum
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar., S.H., M. Hum
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Pertama,


R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Sasaran Program:

1. Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien
2. Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif
3. Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%
2.	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3.	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4.	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif
		2. Kategori publisitas positif melalui media monitoring	Kategori positif
5.	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di Bidang Yudisial	45000
6.	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik

Anggaran:

Rp6.010.130.000,00

Jakarta, 31 Agustus 2021

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,


Arie Sudihar., S.H., M. Hum
NIP 19710123 199603 1 003


R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 196903181996031001